

MEMAJUKAN KABUPATEN MISKIN DENGAN *COMPETITIVE ADVANTAGE*

Rizanda Machmud*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan hulu dari berbagai permasalahan yang ada seperti tingginya angka kesakitan dan kematian, pengangguran, gizi buruk, rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya menghilangkan kemiskinan dirasakan selama ini masih dalam bentuk parsial, belum secara holistik. Pada makalah ini diberikan suatu pemikiran pentingnya keunggulan bersaing suatu daerah (yang merupakan tipikal masing-masing daerah) dengan melakukan clustering, dalam memajukan kabupaten tersebut. Tidak ada pola satu resep untuk penanggulangan kemiskinan ini, penanganan kemajuan suatu kabupaten harus sesuai dengan pola individualistik kabupaten masing-masing.

PENDAHULUAN

Keunggulan bersaing daerah (*competitif advantage of nation*) adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengenali setiap potensi daerahnya dan kemudian mengembangkannya semaksimal mungkin. Keunggulan bersaing daerah juga menggunakan tenaga kerja, sumber dana dan sumber alam daerahnya sendiri. Daerah tersebut mampu berkompetisi dalam menawarkan keseluruhan lingkungan produktif daerahnya untuk dijadikan bisnis (Porter, 2003)

Contoh kasus yang dapat melakukan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) adalah kota Guang Zou China, pemerintah China berhasil melihat potensi masyarakatnya, dan memiliki pola dalam pengembangan ke depan kota tersebut. Pemerintah China berhasil meyakinkan investor bahwa sangat menguntungkan bila berinvestasi di Guang Zou. Penduduk Guang Zou sangat mahir dalam pembuatan tas, sepatu, asesoris. Pemerintah mengundang investor untuk menanamkan modal dalam pembuatan barang-barang tersebut dengan ongkos produksi yang amat murah.

Sektor industri bergerak, pendapatan rumah tangga meningkat, pembangunan di sektor lain ditingkatkan. Perkembangan infrastruktur berkembang cepat, agar banyak pembeli China

mempersiapkan sektor pariwisata. Sehingga terkenal kota ini sebagai kota pariwisata dengan produk-produk bermerek dengan harga 'miring'

Data menunjukkan setelah kematian Mao tahun 1976. Presiden Deng Xiao Ping menjadi pengganti, dan membuka pintu China, setelah puluhan tahun tertutup secara sosial di dunia. Hanya dalam 20 tahun China bisa berubah menjadi negara yang patut diperhitungkan dalam perekonomian dunia. Export China yang dulu hanya 20 juta dollar per tahun naik menjadi 350 juta pertahun hanya dalam 20 tahun. Suatu sukses yang luar biasa, China mampu melakukan kompetisi di pasar dunia (Sach, 2003).

Terdapat empat determinan yang harus diperhatikan karena amat menunjang suatu daerah agar berhasil dalam mewujudkan keunggulan bersaing daerah ini, yaitu (Gambar 1);

1. Kondisi Faktor (*Factor conditions*), yaitu posisi daerah dalam faktor produksi seperti ketersediaan tenaga kerja yang terlatih, sumber pendanaan, infrastruktur dalam administratif, informasi, teknologi, sumber daya alam. Faktor-faktor ini amat penting dalam mengkreasi keunggulan bersaing daerah yang tidak dimiliki daerah lainnya.
2. Kondisi Demand (*demand conditions*), alamiah permintaan yang dibutuhkan pelanggan lokalnya terhadap industri, spesialisasi segmen.
3. Industri yang mendukung atau berhubungan (*related and supporting industries*). Keberadaan

* Staf Pengajar PSIKM FK UNAND

di daerah tersebut industri yang mensuplai kebutuhan industri, adanya cluster yang mensuplai segala kebutuhan industri di daerah tersebut.

- Peraturan daerah yang mendukung investasi dan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual

Gambar 1. Produktivitas dan Lingkungan Bisnis



Sumber : Modifikasi Porter, Michael E, 2003
Microeconomic foundations of competitiveness – A new agenda for international aid institutions. Workshop with the UNDP Leadership Team New York, 18 november

Keunggulan bersaing daerah akan memberikan dampak yang baik sekali, dimana akan terjadi pergeseran wewenang untuk perkembangan ekonomi. Model lama, pemerintah saja mengarahkan perkembangan ekonomi melalui langkah-langkah kebijakan dan insentif. Pada model baru, perkembangan ekonomi adalah suatu proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah pada berbagai level, perusahaan, pengajaran, institusi penelitian, dan kolaborasi instansi yang ada (Porter, 2003).

1. CLUSTERING DALAM KEUNGGULAN BERSAING DAERAH

Clustering merupakan pengelompokan sektor-sektor yang menunjang industri potensi daerah dan kemudian berkembang secara dinamis. Dalam pembuatan cluster ini kita mengetahui sektor mana yang akan kita lakukan pendekatan secara terintegrasi dengan berbasis kerangka Porter tersebut. Hasil dari *cluster* ini, kita akan memiliki jenis kegiatan yang akan kita lakukan, yang selanjutnya pemerintah

daerah memiliki arahan dalam mengeluarkan budget dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan.

2. CLUSTERING DALAM KEUNGGULAN BERSAING DAERAH

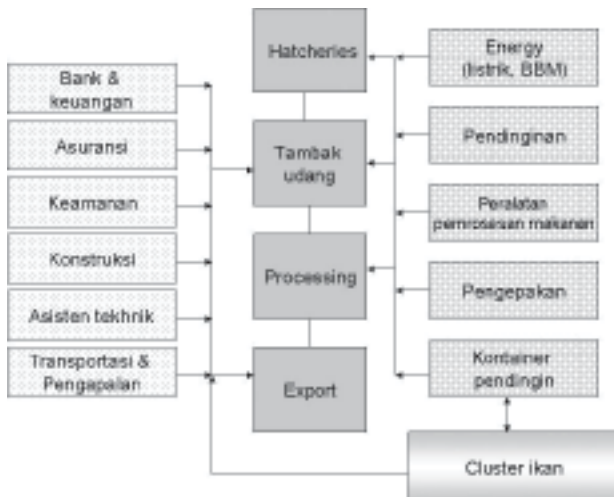
Clustering merupakan pengelompokan sektor-sektor yang menunjang industri potensi daerah dan kemudian berkembang secara dinamis. Dalam pembuatan cluster ini kita mengetahui sektor mana yang akan kita lakukan pendekatan secara terintegrasi dengan berbasis kerangka Porter tersebut. Hasil dari *cluster* ini, kita akan memiliki jenis kegiatan yang akan kita lakukan, yang selanjutnya pemerintah daerah memiliki arahan dalam mengeluarkan budget dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan.

Berikut contoh gambaran kegiatan dalam cluster (Gambar 2), jika potensi yang ada adalah potensi pariwisata. Gambaran *cluster* ini merupakan *cluster* pariwisata dari negara Australia (Porter, 2003).



Gambar 2. Contoh Pola *Cluster* Pariwisata Australia
 Sumber : Modifikasi Porter, Michael E, 2003. *Microeconomic foundations of competitiveness – A new agenda for international aid institutions. Workshop with the UNDP Leadership Team New York, 18 november*

Contoh lainnya *cluster* untuk industri tambak udang (Gambar 3), gambar kegiatan dalam *cluster* adalah sebagai berikut. Gambaran kegiatan *cluster* tambak udang ini contoh dari negara Equador (Porter, 2003)



Gambar 3. Contoh Pola Cluster Tambak Udang Ecuador
 Sumber : Modifikasi Porter, Michael E, 2003. *Microeconomic foundations of competitiveness – A new agenda for international aid institutions. Workshop with the UNDP Leadership Team New York, 18 november*

Dengan adanya cluster ini akan meningkatkan produksi dan efisiensi. Efisien akses terhadap apa yang diinginkan, pelayanan, pekerja, informasi, institusi, dan *public good*. Meringankan koordinasi, akan terjadi difusi yang cepat, perbandingan kinerja yang jelas, cepat melakukan perbaikan jika ada masalah, ini sangat diperlukan dalam menghadapi pesaing untuk memuaskan pelanggan (Porter, 2003).

Cluster juga akan merangsang untuk selalu melakukan inovasi dan perkembangan. Pengetahuan untuk selalu berkreasi lebih juga bertambah, mencegah upaya sekedar 'coba-coba' apa yang dilakukan hanya untuk kepuasan pelanggan. Kelebihan lainnya, dengan cluster akan timbul usaha-usaha baru untuk menunjang bisnis, sehingga industri terus bertumbuh (Porter, 2003).

Melihat bagaimana suatu daerah bisa mengikuti keunggulan bersaing, maka terdapat kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penanganan potensi daerah untuk pendekatan sektor, belum terpadu. Kelemahan lainnya, jenis-jenis kegiatan yang melingkupi dan dibutuhkan industri potensial tersebut, belum dalam bentuk *cluster*.

Contoh pentingnya dibuat *cluster* dalam kegiatan competitive advantage di suatu daerah adalah sebagai berikut; Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan ini sudah memiliki program antara lain; Program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Program IDT adalah ini program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Program ini diarahkan pada pengembangan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin di desa tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Dana program IDT sebesar Rp 20 juta per desa. Permasalahan pelaksanaan IDT salah satunya kesulitan dalam menyalurkan juga memasarkan hasil produksi yang telah meningkat karena adanya program ini (Kartasmita, 1997). Ini menunjukkan kegagalan yang terjadi karena program yang ada tidak dibuat dengan program *cluster* kegiatan.

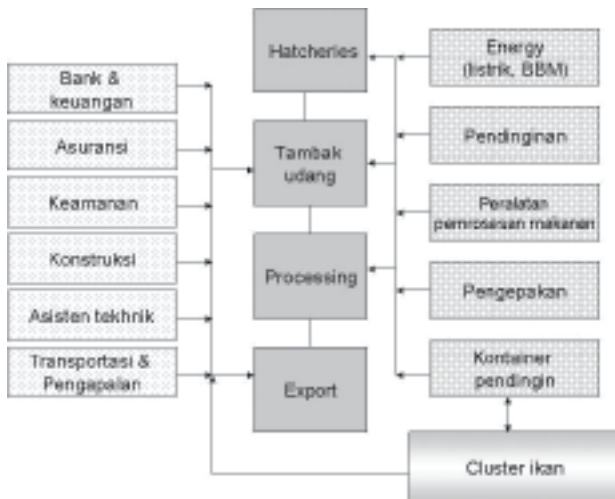
2. HUBUNGAN INDUSTRI, PEMERINTAH, DAN RUMAH TANGGA

Dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin di dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 telah mendeklarasikan *Millenium Development Goals* atau *MDGs*. Dalam deklarasi tersebut, diharapkan seluruh negara anggota PBB, melalui berbagai upaya serius, dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan hingga mencapai 50% pada tahun 2015 (Sumodiningrat, 2005).

Banyaknya penduduk miskin salah satunya disebabkan banyaknya jumlah penduduk usia produktif yang menganggur atau tidak bekerja, baik secara terbuka maupun semi pengangguran. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sarkesnas) Biro Pusat Statistik (BPS), Bappenas menggambarkan sekaligus memprediksikan terjadinya trend peningkatan pengangguran terbuka dari tahun 2000 sampai 2009. hal ini berakibat pada pertambahan penduduk miskin (Sumodiningrat, 2005).

Hubungan antara pemerintah, industri, dan rumah tangga digambarkan dalam teori makro ekonomi. Pengkajian yang akan dilakukan adalah corak kegiatan perekonomian modern. Kegiatan perindustrian yang berkembang di suatu daerah akan menambah pendapatan keluarga, dalam perekonomian yang lebih maju penerima pendapatan akan menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk ditabung. Tabungan ini aka dipinjamkan kepada pengusaha dan mereka menggunakan itu untuk investasi. Investasi akan menambah jumlah barang modal yang tersedia dan meninggikan kemampuan perekonomian menghasilkan barang-barang

kebutuhan masyarakat. Sebagai balas jasa kesediaan penerima pendapatan untuk menabung dan seterusnya dipinjamkan ke pengusaha, pengusaha akan membayar bunga ke seluruh tabungan yang disediakan sektor rumah tangga. Perputaran ini yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga (Samuelson, 1998).



Gambar 29. Sirkulasi Aliran Pendapatan Modern
 Sumber : Modifikasi Sukirno Sadono, 1998 Pengantar teori makroekonomi. Edisi kedua. PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Dengan adanya bentuk *cluster* dalam keunggulan bersaing suatu daerah, secara tidak langsung akan merubah lingkungan daerah tersebut menjadi berkembang lebih baik lagi.

3. KEGIATAN PROGRAM KESEHATAN TERPADU DALAM KEUNGGULAN BERSAING DAERAH

Pola pikir yang sama untuk program kesehatan terutama program kesehatan yaitu, perlu dasar pemikiran 'global' bukan linier. Begitu juga ketika melihat pola masalah kesehatan harus bersama-sama bahwa kesehatan juga merupakan satu bagian dari keunggulan bersaing daerah.

Perubahan kejadian penyakit terjadi karena adanya perubahan-perubahan dari determinan kesehatan. Adanya variasi tingkat dalam determinan ini, diperlukan pendekatan secara *integrated multi-state population health modelling*. Pendekatan terpadu dapat menjelaskan berbagai kejadian faktor-faktor risiko, penyakit serta hubungan sebab akibat (Niessen, 1997).

Pengembangan konsep Manajemen P2M & PL Terpadu Berbasis Wilayah (selanjutnya disingkat

Manajemen P2M & PL Terpadu) diperkenalkan oleh Dirjen P2M dan PL pada tahun 2002 (Fahmi, 2002). Dalam proyek ICDC telah dikembangkan berbagai model inovatif dalam rangka meningkatkan kinerja program P2M dan PL. Setelah dilaksanakan selama 5 tahun, Dirjen P2M dan PL berkesimpulan bahwa proyek tersebut harus menghasilkan suatu sistem manajemen P2M & PL terpadu yang dapat diterapkan di tingkat kabupaten dan kota (Depkes, 2004) .

Manajemen P2M dan PL Terpadu adalah tatalaksana pemberantasan dan pengendalian penyakit dengan cara mengendalikan sumber penyakit dan atau berbagai faktor risiko penyakit secara paripurna, dalam satu perencanaan dan tindakan yang terintegrasi berdasar pada fakta yang dikumpulkan secara sistematis periodik dan terpercaya, dalam satu wilayah (Depkes, 2004) .

Kata wilayah memiliki 2 pengertian. Pertama, wilayah dalam pengertian ekosistem. Penyakit menular memiliki akar kuat (bounded) ke dalam ekosistem, terutama yang ditularkan oleh binatang penular atau melalui reservoir penyakit. Kedua, wilayah bisa bermakna wilayah kewenangan administratif pembangunan seperti kabupaten dan pemerintah kota. Dengan demikian, pemberantasan penyakit menular meski secara administratif merupakan kewenangan para bupati dan walikota. Masalah penyakit menular pada hakekatnya adalah borderless, atau lintas batas. Beberapa penyakit menular memiliki sifat lintas batas negara dan antarwilayah, khususnya berkaitan dengan dinamika mobilitas penduduk, barang, dan jasa (teknologi). Oleh sebab itu kerjasama antar wilayah administratif/negara amat diperlukan (Depkes, 2004).

Upaya untuk mengembangkan Manajemen PPM-PL Terpadu pada wilayah kabupaten/kota yaitu tatalaksana pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dengan cara mengendalikan sumber penyakit, faktor risiko lingkungan dan faktor risiko perilaku penduduk secara paripurna di berbagai sarana kesehatan di kabupaten/kota. Manajemen PPM & PL Terpadu direncanakan secara terintegrasi berdasarkan fakta dari hasil kajian tim surveilans epidemiologi yang dikumpulkan secara sistematis, periodik, dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan mitra kerja serta penguasa wilayah lain/tetangga yang mempunyai ekosistem yang sama.

Pada kenyataannya, kegiatan terpadu dengan lintas batas sangat sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena dasar pemikiran pengambil kebijakan masih

berpikiran linier. Ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan, belum berupa cluster kegiatan. Bila sudah dalam cluster kegiatan, penganggaran kegiatanpun akan dalam bentuk cluster penganggaran terpadu juga.

Bila dilihat dari kegiatan Manajemen P2M – PL Terpadu untuk penanggulangan pneumonia balita, kegiatan kesehatan juga harus mengikuti individualistik pola kabupaten. Kegiatan yang terbentuk dengan landasan competitive advantage teori Porter, mengkaji pada empat faktor dan bentuk cluster kegiatan kesehatan yang terintegrasi dengan daerah.

Berdasarkan hasil pada prevalensi kabupaten yang bervariasi ini, tampaknya penentuan target angka kesakitan balita akibat pneumonia balita perlu disesuaikan per kabupaten. Pada beberapa kabupaten memang telah di bawah target, tetapi masih ada kabupaten yang memiliki angka kesakitan akibat pneumonia balita yang cukup tinggi.

Pandangan baru dalam pembangunan kesehatan yang dicanangkan sejak tahun 1999 adalah paradigma sehat. Maksudnya, perencanaan pembangunan dan pelaksanaan di semua sektor harus mampu mempertimbangkan dampak negatif dan positif terhadap kesehatan, individu dan masyarakat. Upaya kesehatan yang dilakukan perlu lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat preventif dan promotif yang proaktif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Dengan kebijakan desentralisasi, program kesehatan dalam konteks otonomi penuh kabupaten dan kota sangat dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain pemahaman dari pimpinan kabupaten yaitu Bupati, DPRD, dan jajaran kepala dinas tentang makna sehat. Pencanangan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan merupakan dasar yang kuat

untuk pengalokasian dana sektor kesehatan terutama untuk masyarakat miskin serta upaya-upaya dalam peningkatan pembangunan kesehatan penduduk. Pemerintah perlu menekankan pada pelayanan yang mempunyai dampak pada masyarakat luas 'public good' serta melindungi masyarakat miskin untuk tetap dapat menjangkau pelayanan kuratif yang mereka perlukan.

KESIMPULAN

Keunggulan bersaing daerah (*competitive advantage of nation*) adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengenali setiap potensi daerahnya dan kemudian mengembangkannya semaksimal mungkin. Dampak yang didapatkan sangat baik sekali, dimana terjadi perkembangan ekonomi yang merupakan proses kolaborasi yang melibatkan pemerintah pada berbagai level, perusahaan, pengajaran, institusi penelitian, dan kolaborasi instansi yang ada. Peranan *Clustering* dalam keunggulan bersaing daerah adalah dengan melakukan pengelompokan sektor-sektor yang menunjang industri potensi daerah dan kemudian berkembang secara dinamis. Dalam pembuatan cluster ini kita mengetahui sektor mana yang akan kita lakukan pendekatan secara terintegrasi dengan berbasis kerangka Porter. Hasil dari *cluster* ini, kita akan memiliki jenis kegiatan yang akan kita lakukan, yang selanjutnya pemerintah daerah memiliki arahan dalam mengeluarkan budget dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan. Sementara itu peranan kesehatan harus beriringan dan menyatu dengan konsep competitive advantage dari masing-masing kabupaten. Tidak menyama-ratakan program kesehatan untuk seluruh kabupaten. Tiap kabupaten/kota memiliki karakteristik program kesehatan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004 Pelatihan Manajemen P2M & PL Terpadu Berbasis Wilayah kabupaten/Kota Modul Analisis Faktor Risiko Lingkungan. Direktorat Jendral Pemberantasan Penyakit menular dan Penyehatan Lingkungan. Jakarta
2. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2004 Pelatihan Manajemen P2M & PL Terpadu Berbasis Wilayah kabupaten/Kota Modul Tim epidemiologi Kabupaten dan Tim Epidemiologi Puskesmas (TEK dan TEPUS). Direktorat Jendral Pemberantasan Penyakit menular dan Penyehatan Lingkungan. Jakarta
3. Kartasasmita Ginanjar, 1997 Kemiskinan. Balai Pustaka. Jakarta, 110h.
4. Niessen LW en Hilderink HBM, 1997 *The population and health model*. Ch 4 in: Rotmans J and De Vries (eds): Perspectives on global change: the TARGETS approach. Cambridge UP.
5. Porter, Michael E, 1990 *The competitive advantage of nations*. The Free Press, New York
6. Porter, Michael E, 2003 *Microeconomic foundations of competitiveness – A new agenda for international aid institutions*. Workshop with the UNDP Leadership Team New York, 18 november
7. Sach D Jeffrey, 2003 *Economic reform in emerging economies*, Public lecture, January 14th
8. Sach D Jeffrey, 2003 *Ending Global Poverty*. Humanitarian

- Intervention Today: New Issues, New Ideas, New Players, September 24
9. Sach D Jeffrey, 2003 Achieving the Millenium goals: Health in the Developing World. The Second Global Consultation of the Comission on Macroeconomics and Health Geneva, October 29th
 10. Sach D Jeffrey, 2003 Lessons for Brazil from China's succes, San Paulo, November 5, 2003
 11. Sach D Jeffrey, 2004 Stages of economic Development, Chinese Academy of Arts and Sciences. Beijing, June 19
 12. Sach D Jeffrey, 2004 Plan aims to end extreme poverty: if aid pledges are honoured, goal is attainable, UN told
 13. Sach D Jeffrey, 2005 The end of Poverty. Publish monthly in US by Penguin.
 14. Sach D Jeffrey, 2005 The end of Poverty: In a world of plenty, 1 billion people are so poor, their lives are in danger. How to change that for good. Time , March 14.
 15. Samuelson Paul A; Nordhaus William D, 1998 Economics. Sixteenth edition Irwin McGraw-Hill
 16. Sumodiningrat Gunawan, 2005 MDGs dan Indonesia. Kompas, Sabtu, 6 Agustus 2005.